



ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYARATAN DESA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DESA CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

Otong Karyono

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana

Universitas Majalengka, Jawa Barat, Indonesia.

e-mail korespondensi : karyono.otong@gmail.com

Disubmit Agustus 2019 , Diterima September 2019 , Diterbitkan Oktober 2019

Submitted August 2019, **Accepted** September 2019, **Published** October 2019

Penulis koresponden



Abstract

During the reform era, the formation of the BPD was intended to improve the performance of the BPD, but in its implementation the performance of the BPD was not in line with community expectations and this was evidenced by the lack of socialization with the community. This study uses a verification research method with analytical techniques using simple linear regression analysis. The results showed that the performance of BPD was proven to have a positive and significant effect on community satisfaction. That is, BPD that has performance in accordance with community expectations can provide satisfaction to the community.

Keywords: Performance; Community Satisfaction.

Jurnal **DIALOGIKA**
diterbitkan oleh
Program Pascasarjana
Administrasi Publik
Universitas Majalengka

Abstrak

Pada masa orde reformasi terbentuknya BPD dimaksudkan untuk menyempurnakan kinerja BPD, namun dalam pelaksanaannya kinerja BPD belum sesuai dengan harapan masyarakat dan hal ini dibuktikan dengan kurangnya melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian verifikatif dengan teknik analisis menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Artinya, BPD yang memiliki kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat dapat memberikan kepuasan kepada masyarakatnya.

Kata kunci: Kinerja; Kepuasan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah membawa perubahan dalam setiap aspek pemerintahan, terutama memberikan ruang yang cukup luas terhadap partisipasi masyarakat dalam ikut mensukseskan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga hal yang demikian tersebut telah menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan dengan pola partisipasi tersebut diharapkan akan terwujud akselerasi dari hasil-hasil pembangunan yang berdayaguna dalam meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat. Penyampaian aspirasi masyarakat tersebut dapat melalui lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilakukan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bukti sebagai penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan merupakan salah satu bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proposional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dictator atau raja absolut, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya (Ramayanti, 2008:2). Sebagai bentuk perwujudan sebuah Negara yang berdaulat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya berada di tangan rakyat, artinya suara rakyat banyak benar-benar didengar, keluhan, dan penderitaannya. Inilah contoh negara demokrasi, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi hal ini tampaknya hanya sekedar untuk menutupi perilaku pemerintah yang berkuasa

Pada masa orde reformasi, maka dibentuklah BPD untuk menyempurnakan tugas dan tanggungjawab LMD maupun LKMD. Namun dalam pelaksanaannya, BPD masih dihadapkan pada beberapa permasalahan di antaranya kurang aktifnya BPD dalam menjalankan fungsinya, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa masih kurang efektif, BPD belum maksimal dalam memberikan pengawasan dengan baik, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal ini dikarenakan kurang keterbukaannya perangkat desa mengenai informasi mengenai bantuan desa

yang semestinya BPD juga mengetahui informasi tersebut. Masalah lainnya adalah BPD kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan masyarakat (Hasil Observasi, 2018).

Kehadiran BPD dalam orde reformasi adalah untuk meningkatkan pelayanan public sehingga akan tercipta kepuasan masyarakat. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, hendaknya harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar masyarakat yang menerima pelayanan itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Kepuasan pelanggan atau konsumen menjadi ukuran utama Pelayanan publik, kualitas pelayanan baik di bidang bisnis, manajemen maupun birokrasi. Kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba maupun nirlaba menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Kepuasan pelanggan bergeser ke arah birokrasi pemerintahan dalam rangka pelayanan publik, karena peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bentuk pelayanan adalah sangat penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (UU No. 25/2009, Bab UI, Pasal 1).

Oleh karena itu, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh sektor publik sampai saat ini masih kurang memuaskan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan birokrasi bukan melayani pelanggan (*customer*) tetapi melayani warga negara (Rahmayanti, 2013:28). Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pelayanan yang diberikan oleh BPD kepada masyarakat tidak dapat diukur oleh pihak yang melayani, melainkan harus ditentukan

oleh pihak yang dilayani (masyarakat). Hal ini disebabkan karena masyarakatlah yang merasakan, apakah masyarakat merasa puas atau belum, dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan berdasarkan harapan dalam memenuhi kepuasannya.(Mardiyanto dan Ismowati, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pada kinerja BPD dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan perbedaan antara BPD dengan lembaga sebelumnya pada masa orde baru.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode survey. Penelitian ini merupakan pendekatan ilmu administrasi dan organisasi dengan kajian utama ilmu kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian verifikatif.

Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner terhadap responden, kemudian data diolah dan dianalisis dengan pendekatan statistik parametrik. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Analisis jalur (*path analysis*) bertujuan untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik itu pengaruh yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung, serta mengukur besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat yang disebut dengan koefisien jalur. Mengingat data yang diperoleh adalah data ordinal, sedangkan analisis data memerlukan data interval, maka terlebih dahulu data mentah yang telah dikumpulkan kemudian ditransfor-masikan menjadi data interval melalui metode *successive interval*.

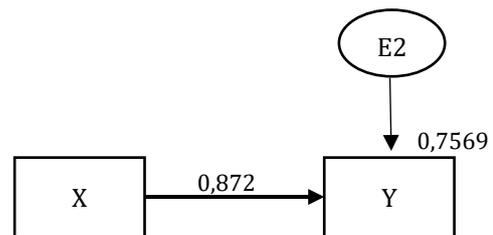
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, dari hasil pengolahan dan analisis data dengan bantuan komputer program SEM. Analisis data terditi atas dua macam, yaitu analisis deskriptif dan analisis ferivikatif, dengan hasil sebagai berikut.

Dari hasil analisis deskriptif, diketahui bahwa secara umum kondisi kinerja BPD Desa Cikijing masuk kategori cukup, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek

sosialisasi terhadap program-program yang telah direncanakan yang merupakan temuan empiris untuk variabel kinerja BPD. Demikian juga halnya dengan variabel kepuasan masyarakat Desa Cikijing, secara umum berada pada kategori cukup, namun masih terdapat kelemahan pada aspek tertentu.

Dari hasil analisis ferivikatif diperoleh data tentang pengaruh kinerja BPD terhadap kepuasan masyarakat Desa Cikijing, berdasarkan analisis jalur diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar 1. Konstruk 2 Analisis Jalur

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,872 dengan R^2 sebesar 0,7569. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kontribusi pengaruh dari kinerja BPD (X) terhadap kepuasan masyarakat (Y) adalah $(0,872 \times 100\%) = 75,69\%$. Dengan kata lain, bahwa kinerja BPD memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat Desa Cikijing sebesar 75,69 % selebihnya (24,31%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh kinerja BPD terhadap kepuasan masyarakat dilakukan pengujian hipotesis. Dari hasil perhitungan, pengujian hipotesis dari kinerja BPD terhadap kepuasan masyarakat terbukti signifikan. Hal ini didasarkan dari nilai CR untuk variabel kinerja BPD terhadap kepuasan masyarakat sebesar 19,623 yang ternyata lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,979, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Kinerja BPD dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas, akuntabilitas dan produktivitas. Hasil penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa ketiga indikator tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Efektivitas berkaitan berkaitan dengan rasionalitas, teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi sebagai agen

pembangunan. Hasil temuan menunjukkan bahwa BPD di Desa Cikijing menunjukkan cukup efektif dalam melaksanakan tugas, namun demikian masih memiliki kelemahan yaitu kurang intensifnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program desa. Hasil penelitian terhadap produktivitas berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan produk. Badan Permusyawaratan Desa Cikijing sebagai organisasi menghasilkan Peraturan Desa dan rencana pembangunan Desa Cikijing. Apabila dilihat dari segi rencana pembangunan, dapat dilihat bahwa kontribusi BPD adalah pada rencana pembangunan yang dibuat dalam RPJM Desa. Namun dalam pelaksanaannya meskipun sebagian besar masyarakat cukup puas, tetapi masih ditemukannya tidak semua rencana yang dilaksanakan tepat waktu.

PENUTUP

Hasil penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa kinerja BPD yang sesuai dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Dari hasil observasi yang ditemukan peneliti bahwa rata-rata secara umum kinerja BPD termasuk dalam kategori cukup, namun masih memiliki kelemahan di antaranya kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD dengan masyarakat terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan yang direncanakan maupun program yang akan dilaksanakan.

Apabila pengurus BPD desa Cikijing bermaksud untuk meningkatkan kinerja disarankan untuk memperbaiki aspek yang masih lemah, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas perencanaan dan melakukan sosialisasi program yang lebih intensif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Istiqomah, Siti. 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Ringintunggal Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013). Vol.3, No. 1, Januari – April 2015.

Mardiyanto, Rizka dan Ismowati, Mary. 2017. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kantor Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang, 9(2), 184-197.

Rahmayanti, N. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Simbolon, Alamsyah Hamonangan, Walid Mustafa Sembiring. 2015. Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 3. No. 2. 2015. pp. 143-159.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik.

Widiyanti, Ratih. 2011. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang Demokratis (Studi kasus di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Skripsi. Jurusan Hukum Kewarganegaraan : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Yuniarni, 2014. Penilaian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Naskah Publikasi : Ilmu Administrasi Negara. Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjung Pinang.

BIOGRAFI PENULIS



Otong Karyono, Lektor, Pjs. Kaprodi Magister Ilmu Administrasi, Manajemen Strategik.

Email: karyono.otong@gmail.com